

## **BAB II**

### **RELEVANSI INVESTASI ASING BAGI PEMBANGUNAN KABUPATEN**

Di era otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan kreativitas dan inisiatif lebih dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya, dengan dilaksanakan secara terpadu, serasi dan terarah, pembangunan daerah dapat benar-benar sesuai prioritas dan potensi daerah, sehingga daerah dapat menjadi mandiri dalam pengelolaan kewenangannya. Dalam proses pembangunan daerah juga perlu dukungan dari pihak swasta salahsatunya melalui kegiatan investasi yang akan membantu mempercepat pengembangan suatu daerah, tidak terkecuali untuk Kabupaten Brebes.

#### **A. Profil Kabupaten Brebes**

##### **1. Sejarah kabupaten Brebes**

Nama Kabupaten Brebes diambil dari kata “Bara” yang berarti hamparan tanah luas dan “Basah” yang berarti wilayah yang banyak mengandung air, barabas, seperti yang kita ketahui, bahwa keduanya (bara dan basah) merupakan wilayah yang kini terdapat di Brebes. Dalam bahasa jawa, kata Brebes atau Mbrebes berarti “Tansah mili banyune” (keluar airnya).<sup>39</sup>

Brebes sendiri merupakan Kabupaten paling ujung Jawa Tengah ini juga berderetan dengan kota-kota lain ditepi pantai, seperti Pemalang, Tegal dan Pekalongan.

##### **2. Geografi**

Kabupaten Brebes terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah, memanjang keselatan berbatasan dengan wilayah Karesidenan Banyumas. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Letaknya antara 6044’ – 7021’ Lintang Selatan dan antara 108041’ – 109011’. Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah sebesar 1.662,96

---

<sup>39</sup> Pemda Brebes, “Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017”, hal II-1

km<sup>2</sup>, terdiri dari 17 Kecamatan dan 297 desa/kelurahan. Pada Tahun 2015, luas tanah sawah sebesar 627,03 km<sup>2</sup> (37,70%) dan luas tanah bukan sawah sebesar 1.035,93 km<sup>2</sup> (62,30%). Sebagian besar luas tanah sawah merupakan sawah berpengairan 46.087 Ha (73,50%), sedangkan sisanya (26,50%) merupakan sawah tadah hujan.<sup>40</sup>

### 3. Pemerintahan

Pada periode 2014 - 2019 anggota DPRD Kabupaten Brebes sebanyak 50 orang dengan jumlah fraksi sebanyak 9 fraksi yang merupakan hasil pemilu legislatif pada tahun 2014. Jumlah anggota DPRD terbanyak dari fraksi PDI-P yaitu 11 kursi (22,00 persen), kemudian disusul fraksi PKB sebanyak 8 kursi (16,00 persen), fraksi Golkar sebanyak 7 kursi, fraksi PKS sebanyak 6 kursi dan fraksi PAN & GERINDRA masing-masing 5 kursi, fraksi Demokrat sebanyak 4 kursi, fraksi PPP sebanyak 3 kursi, dan fraksi Hanura sebanyak 1 kursi . Jabatan ketua DPRD Kabupaten Brebes selama periode 2014 – 2019 berasal dari fraksi PDI-P, sedangkan wakil ketua sebanyak 3 orang berasal dari fraksi PKB, Golkar, dan PKS. Pada tahun 2015 secara umum anggaran pendapatan daerah meningkat sebesar 18,26 persen yaitu dari Rp. 2.043,92 Milyard pada 2014 menjadi Rp. 2.417,21 Milyard pada 2015. Namun demikian, anggaran belanja daerah juga meningkat sebesar 21,63 persen yaitu dari Rp. 1.967,17 Milyard pada 2014 menjadi Rp. 2.392,38 Milyard pada 2015. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Brebes pada tahun 2015 menyumbang sebesar Rp301,95 Milyard, mengalami kenaikan sebesar 12,76 persen.<sup>41</sup>

### 4. Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2015 adalah 1.781.379 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan angka seks rasio sebesar 101,02 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Secara absolut, masing-masing jumlahnya adalah 895.209 jiwa penduduk laki-laki dan 886.170 jiwa penduduk perempuan.

---

<sup>40</sup> Ibid., hal II-2

<sup>41</sup> Diakses dari <http://brebesnews.co/2014/04/inilah-hasil-rekapitulasi-caleg-terpilih-2014-2/> pada Sabtu 8 Juli 2017

Bila dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu jumlah penduduk Kabupaten Brebes sebesar 1.736.782 sehingga telah terjadi penambahan penduduk sebanyak 44.597 jiwa, atau dapat dikatakan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,51%. Penduduk Kabupaten Brebes sebagian besar tinggal didaerah pedesaan, namun demikian sering terjadi perpindahan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan (Urbanisasi), karena peluang untuk mendapatkan pekerjaan di daerah pedesaan relatif kecil. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Brebes berupaya memacu pengembangan pembangunan daerah agar daerahnya tidak ketinggalan dengan daerah lain. Jumlah penduduk per Kecamatan sangat bervariasi, distribusi penduduk Kabupaten Brebes belum tersebar secara merata. Tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Bulakamba 168.518 jiwa (9,55%), Kecamatan Brebes 159.719 jiwa (8,94%), dan Kecamatan Wanasari sebanyak 148.269 jiwa (8,46%). Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Salem sebanyak 59.288 jiwa atau (3,28%).<sup>42</sup>

## 5. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak bisa mengandalkan sumber daya alam semata maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan, dimana pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tersebut.

Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut. Salah satu sisi yang dapat dilihat untuk mengetahui gambaran pendidikan suatu daerah adalah jumlah sekolah, guru, dan murid. Pada Tahun 2015 sebagian besar jumlah sekolah di Kabupaten Brebes jumlahnya masih sama dengan tahun sebelumnya, kecuali sekolah MTs dan MA yang mengalami penambahan. Jumlah guru dalam suatu Kabupaten akan menggambarkan ketersediaan tenaga pendidik dalam wilayah tersebut. Jumlah guru di Kabupaten Brebes pada tahun 2015 relatif bertambah jumlahnya jika dibandingkan tahun 2014. Jumlah murid di kabupaten Brebes relatif meningkat pada tahun 2015 dibandingkan satu tahun sebelumnya kecuali jumlah murid pada

---

<sup>42</sup> Pemda Brebes, Op. Cit. Hal II-29

tingkat SD. Jumlah murid SD/MI pada tahun 2015 adalah 198.797, berkurang sebanyak 4.079 orang jika dibandingkan tahun 2014.<sup>43</sup>

#### 6. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Semakin tinggi angka IPM mengindikasikan semakin lebih baik tingkat keberhasilan pembangunan wilayahnya, demikian pula sebaliknya. Mulai tahun 2014 penghitungan angka IPM menggunakan metode terbaru dengan mengubah komponen angka melek huruf menjadi harapan lama sekolah. Ada 4 komponen pembentuk IPM dengan metode terbaru, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan. Pada 2015 angka IPM Kabupaten Brebes sebesar 63,18 menempati urutan terakhir (ke-35) di Provinsi Jawa Tengah. Jika diperhatikan pada ke-4 komponen pembentuk IPM tersebut mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Brebes meningkat sebesar 0,30 tahun, yaitu dari 67,90 tahun pada tahun 2014 menjadi 68,20 tahun pada tahun 2015. Harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,31 tahun, yaitu dari 11,03 pada tahun 2014 menjadi 11,34 pada tahun 2015. Sementara itu, rata-rata lama sekolah mencapai 5,88 tahun yang berarti bahwa rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berumur 15 tahun keatas untuk menempuh semua pendidikan formal selama 5,88 tahun. Komponen yang lain adalah rata-rata pengeluaran perkapita, yaitu mencapai Rp. 8.898.000,- selama tahun 2015.<sup>44</sup>

### **B. Potensi dan Sarana Pendukung Investasi di Kabupaten Brebes**

#### 1. Bidang Pariwisata

Jumlah obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 6 tempat wisata. Obyek wisata tersebut diantaranya meliputi 3 kolam renang dan pemandian air panas, 1 pantai wisata, 1 waduk dan 1 perkebunan teh. Obyek wisata Kolam Renang Tirta Kencana dan Pantai Randusanga Indah berada di Kecamatan Brebes, Pemandian Tirta Husada dan Perkebunan Teh Kali Gua berada di Kecamatan

---

<sup>43</sup> Ibid., Hal II-81

<sup>44</sup> Ibid., Hal II-56

Paguyangan, Pemandian Cipanas berada di Kecamatan Bantarkawung, dan Waduk Malahayu berada di Kecamatan Banjarharjo.

Selama 3 tahun terakhir Perkebunan Teh Kaligua merupakan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan dengan jumlah pengunjung mencapai 138.983 orang pada tahun 2015. Kemudian disusul obyek wisata Pantai Randusanga Indah yang terletak di Kecamatan Brebes dengan jumlah pengunjung mencapai 62.582 orang.<sup>45</sup>

*Tabel 2 Pengunjung Objek Wisata Di kabupaten Brebes*

Objek Wisata	2013	2014	2015
Kolam Renang Tirta Kencana	34.370	38.024	37.392
Pemandian Tirta Husada	33.782	37.298	25.671
Pemandian Cipanas Buaran	21.932	31.080	28.227
Pantai Randusanga Indah	46.422	50.795	62.582
Waduk Malahayu	50.225	37.458	46.824
Kaligua	79.374	87.233	138.983

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Brebes, 2015

Pada Tabel 2 terlihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengunjung, terutama pada obyek wisata Kolam Renang Tirta Kencana, Pemandian air panas Tirta Husada dan Hal ini disebabkan persaingan antar obyek wisata dalam memberikan berbagai fasilitas yang dapat memikat daya tarik pengunjung dan kecenderungan wisatawan untuk beralih ke obyek wisata yang lebih alami. Akibatnya pendapatan yang diperoleh obyek wisata tersebut juga mengalami penurunan, terutama obyek wisata Kolam Renang Tirta Kencana.

## 2. Bidang Perdagangan

Perkembangan ekonomi suatu daerah salah satunya dapat dilihat berdasarkan kegiatan perdagangannya. Pada gambar di samping menunjukkan bahwa pedagang terbanyak yang berusaha di pasar tradisional adalah pedagang menengah yaitu sebanyak 4.206 usaha (59,91 persen), diikuti pedagang besar sebanyak 2.056 usaha dan pedagang kecil sebanyak 758 usaha.

<sup>45</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), 2016 : Statistik Daerah Kabupaten Brebes, 2016, Hal 20

Kategori perdagangan memberi kontribusi yang cukup besar kedua setelah kategori pertanian terhadap pemerolehan PDRB di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2015 nilai tambah bruto dari kategori perdagangan mencapai 5,51 trilyun Rupiah. Namun yang menarik pada kategori ini adalah kontribusinya cenderung terus menurun dari 18,22 persen pada tahun 2011 menjadi 16,03 persen pada tahun 2015. Ini sejalan dengan penurunan kontribusi kategori pertanian. Ini menunjukkan bahwa perdagangan di Kabupaten Brebes didominasi barang-barang hasil pertanian.

Laju pertumbuhan kategori perdagangan dari 2011 hingga 2015 cenderung mengalami perlambatan dari 7,30 persen pada tahun 2011 melambat menjadi 4,35 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,15 persen.

### 3. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Data produksi tanaman pangan (padi dan palawija) merupakan salah satu indikator ketersediaan pangan nasional. Secara umum pada tahun 2015 komoditas padi dan jagung mengalami penambahan luas panen, sedangkan untuk komoditas kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar mengalami penurunan luas panen.

Pada tahun 2015, luas panen padi mencapai 99,865 hektar dan luas panen jagung mencapai 17,920 hektar atau mengalami peningkatan luas panen dibandingkan tahun 2014. Sedangkan luas panen kacang hijau mengalami penurunan hingga mencapai 47,27 persen, yaitu semula seluas 2.456 hektar pada tahun 2014 menjadi hanya sekitar 1.295 hektar.

Produksi tanaman sayuran di Kabupaten Brebes cukup melimpah, khususnya produksi bawang merah mencapai 311.291 ton dengan luas areal tanam 26.645 hektar. Dengan demikian rata-rata produksinya mencapai 11,68 ton/hektar. Produksi tanaman sayuran lainnya yang merupakan andalan Kabupaten Brebes adalah kentang dan kubis.

Jenis ternak yang umum dipelihara oleh penduduk di Kabupaten Brebes adalah ayam kampung, kambing, dan domba. Pada tahun 2015 tercatat populasi ayam kampung mencapai 2.628.632 ekor, mengalami penurunan dibanding tahun 2014,

yaitu 2.635.690 ekor. Sedangkan populasi kambing sebesar 117.508 ekor, dan populasi domba mencapai 174.479 ekor.

Sementara itu, ayam ras petelur dan pedaging pada umumnya dipelihara oleh pengusaha perorangan untuk diambil telur dan atau dagingnya, sehingga jumlahnya pun cukup melimpah. Jika diperhatikan jumlah ayam ras pedaging cukup tinggi mencapai 6.121.304 ekor. Sedangkan keberadaan sapi perah dan kuda jumlahnya relatif sedikit.

Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha budidaya ikan mencapai 6.334 rumah tangga. Jika dilihat menurut jenis budidaya, ternyata sebesar 60,89 rumah tangga usaha melakukan budidaya ikan di tambak, kemudian disusul sebanyak 37,90 persen rumah tangga usaha membudidayakan ikan di kolam. Sedangkan rumah tangga usaha yang membudidayakan ikan di laut dan di perairan umum cukup kecil, yaitu masing-masing hanya 0,30 persen dan 0,33 persen.

#### 4. Bidang Sumber Daya Manusia

Selama 3 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka (TPT) berfluktuasi, yaitu 9,54 persen pada 2013 turun menjadi 9,53 persen pada tahun 2014, kemudian turun lagi menjadi 6,49 persen pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor industri. Secara absolut jumlah angkatan kerja di Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebesar 821.102 jiwa, sedangkan bukan angkatan kerja berjumlah 486.140 jiwa.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Brebes bekerja pada sektor pertanian, yaitu mencapai 41,34 persen. Hal ini sejalan dengan kondisi wilayah Kabupaten Brebes yang secara agraris merupakan daerah potensial pertanian. Sementara itu penduduk yang bekerja di sektor industri meningkat sebesar 1,82 persen menjadi 7,62 persen. Hal ini dikarenakan adanya beberapa industri/perusahaan baru yang masuk ke wilayah Kabupaten Brebes. Sementara itu sektor lainnya yang merupakan gabungan antara sektor pertambangan dan penggalian, LGA, konstruksi dan sektor transportasi & pergudangan sebesar 15,12 persen. Sedangkan sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan mengalami penurunan.

Persentase penduduk perempuan yang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Sedangkan

lapangan usaha di sektor konstruksi dan transportasi didominasi oleh penduduk laki-laki. Sementara itu persentase penduduk perempuan yang bekerja di sektor listrik, gas, dan air bersih serta transportasi dan perdagangan relatif sedikit atau mendekati 0,00 persen.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes tahun 2015 mencapai 6,49 persen dengan jumlah pengangguran mencapai 53.261 orang. Secara umum, jumlah pengangguran menurun 3,04 persen bila dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 9,53 persen. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Brebes pada tahun 2015 sebanyak 821.102 orang, dimana sebanyak 767.841 jiwa adalah penduduk yang bekerja dan sebanyak 53.261 jiwa atau 6,49 persen adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Keadaan ini menurun sebanyak 27.159 orang dibandingkan tahun 2014.

#### 5. Konstruksi

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) di sektor konstruksi selama empat tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Hal ini sejalan dengan harga

barang dan jasa bangunan yang juga terus meningkat setiap tahun. Pada 2015 PDRB adhb di sektor konstruksi sebesar Rp1.506,92 milyar atau naik sebesar 19,83 persen bila dibandingkan tahun 2014, yaitu senilai Rp 1.257,52 milyar.

Realisasi belanja modal untuk kategori konstruksi pada tahun 469.584,32 milyar rupiah atau sekitar 19,63 persen dari total keseluruhan realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Brebes. Realisasi belanja modal untuk kategori konstruksi yang paling tinggi dialokasikan untuk pengadaan gedung dan bangunan mencapai 59,00 persen atau meningkat dua kali lipat bila dibandingkan tahun 2014 yang hanya 28,70 persen. Kemudian disusul oleh pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 22,46 persen serta pengadaan peralatan dan mesin sebesar 17,97 persen. Sedangkan untuk pengadaan asset lainnya tidak dialokasikan anggarannya.

#### 6. Industri Pengolahan

Selama tahun 2014 - 2015 jumlah industri pengolahan tidak mengalami perubahan yang signifikan, khususnya industri kimia, argo, dan hasil hutan serta industri logam, mesin, dan perekayasaan. Pada tahun 2015 jumlah usaha industri kecil formal sebesar 1.813 unit, sedangkan usaha industri kecil non formal sebesar 4.456 unit. Unit usaha industri kecil tersebut terbagi menjadi 3 usaha, yaitu industri

kimia, agro, dan hasil hutan sebanyak 4.754 unit usaha; industri elektronika dan aneka sebanyak 620 unit usaha; dan industri logam, mesin, dan perekayasaan sebanyak 895 unit usaha.

Penyerapan jumlah tenaga kerja pada industri kimia, agro, dan hasil hutan mencapai 11.878 tenaga kerja; industri elektronika dan aneka sebanyak 2.323 tenaga kerja; dan industri logam, mesin, dan perekayasaan sebanyak 2.133 tenaga kerja, baik pada sektor formal maupun non formal.

Sementara itu perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku sektor industri pengolahan cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 PDRB adhb sektor industri pengolahan sebesar sebesar Rp. 5.023,91 Milyard atau naik sebesar 16,94 persen dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 4.296,14 Milyard.

#### 7. Bidang Transportasi dan Komunikasi

Jalan sebagai sarana angkutan darat sangat penting untuk memperlancar mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Panjang jalan kabupaten secara keseluruhan di Kabupaten Brebes meningkat dari 656,84 km menjadi 710,19 Km.

Jika diperhatikan berdasarkan kondisi jalan, ternyata jalan kabupaten cenderung membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 panjang jalan yang kondisinya baik sepanjang 379,80 km meningkat menjadi 453,31 km. Sementara itu jalan yang kondisinya rusak dan rusak berat pada tahun 2014 sepanjang 83,59 km dan 149,23 km menurun menjadi masing-masing 67,49 km dan 152,68 km.

Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes sebanyak 303.754 unit yang sebagian besar adalah sepeda motor yaitu sebanyak 284.677 unit atau sebanyak 93,72 persen dari total kendaraan bermotor. Ini kemudian diikuti Mobil penumpang sebanyak 18.588 unit atau sebanyak 6,12 persen. Sementara itu jumlah bus dan truk masih sangat rendah yaitu kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2013 kategori ini menghasilkan nilai tambah sebesar 751,43 milyar meningkat menjadi 874,94 milyar Rupiah pada tahun 2014 dan 967,78 milyar Rupiah pada tahun 2015.

Kontribusi PDRB pada kategori Informasi dan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cenderung sedikit mengalami peningkatan yaitu dari 2,71 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,81 persen pada tahun 2012, pada tahun 2013 menjadi sebesar 2,74 persen, pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,83 persen dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 2,81 persen.

Sementara itu, laju pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi meningkat cukup pesat selama periode 2012 hingga tahun 2015, yaitu selalu di atas sebelas persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2014 yang sebesar 20,30 persen. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi kategori ini mengalami perlambatan yaitu turun menjadi sebesar 12,82 persen. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dunia yang cukup pesat, khususnya perkembangan jaringan internet yang sudah dapat diakses melalui hand phone (HP).

### **C. Fenomena Investasi di Kabupaten Brebes**

Di masa sekarang masyarakat dunia tidak dapat menolak serangan arus globalisasi yang semakin merajalela di setiap belahan bumi manapun. Globalisasi menjadi bagian penting dalam perkembangan hubungan internasional, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan internasional berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir keberadaan globalisasi semakin nampak jelas yang dibuktikan dengan batas antar negara tidak jelas akibat sifat ketergantungan antar negara yang semakin erat dari waktu ke waktu. Memang dalam waktu sekarang tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata. Hal tersebut mendorong antar negara dan antar individu berlomba-lomba menjadikan negaranya untuk lebih unggul dibanding negara lain dengan melakukan kerjasama.

Dewasa ini globalisasi dan segala efeknya telah membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap konstelasi dunia dan segala aspek kehidupan manusia. Globalisasi semakin tidak dapat dihindari, negara tidak dapat menutup keberadaan mereka dari globalisasi. Sehingga setiap negara wajib untuk melaksanakan kerjasama antar bangsa untuk memudahkan operasi kebutuhan bagi kepentingan di negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan globalisasi hubungan internasional juga ikut berkembang karena terdapat banyak perkembangan

konstelasi hubungan internasional dari masa ke masa. Sekarang hubungan internasional tidak hanya menyangkut persoalan suatu negara dan pencapaian perdamaian senjata, akan tetapi menyangkut masalah perkembangan ekonomi dunia, politik, budaya, isu kesetaraan gender dan lain-lain.

Keberagaman aktor hubungan luar negeri selain negara (non-state actors) seperti organisasi-organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai suatu potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup hubungan internasional. Maka dari itu kini hubungan luar negeri dapat dijalankan oleh juga oleh pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, pejabat daerah dan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang berkelanjutan yang telah membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan internasional. Hubungan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri. Dengan adanya koordinasi dan konsultasi kepada Departemen Luar Negeri maka kerjasama yang boleh dijalankan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Kerjasama Ekonomi : Perdagangan; Investasi; Ketenagakerjaan; Kelautan dan Perikanan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kehutanan; Pertanian; Pertambangan; Kependudukan; Pariwisata; Lingkungan Hidup; Perhubungan.
2. Kerjasama Sosial Budaya: Pendidikan, Kesehatan; Kepemudaan; Kewanitaan; Olahraga; Kesenian.
3. Bentuk kerjasama lain.

Dengan munculnya Pemerintah Daerah (Pemda) pada kerjasama dan transaksi internasional maka kini dapat kita jumpai istilah Governance to Governance (G to G) dan Governance to Bussiness (G to B) yang merupakan perkembangan dalam

---

<sup>46</sup> Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri. 2007. *"Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah"*. Jakarta : CV. Vadra Utama. Hal. 18

bidang pemerintahan untuk dapat meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis.<sup>47</sup> Kedua istilah ini muncul akibat perkembangan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan.

1. *Government to Governance* (G to G) merupakan hubungan yang terjadi akibat adanya transaksi antar pemerintah untuk memenuhi bermacam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya, dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancar kerjasama pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan.
2. *Governance to Business* (G to B) merupakan hubungan yang terjadi karena pemerintah harus mampu membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomiannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

Investasi asing oleh Pemerintah Kabupaten Brebes tergolong sebagai transaksi *Government to Business* (G to B) karena merupakan tugas utama pemerintah Kabupaten Brebes yang harus mampu membentuk lingkungan bisnis dan menjalankan roda perekonomian yang kondusif melalui penanaman modal asing (PMA). Terjadinya hubungan bisnis antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan pelaku usaha tidak hanya mempererat hubungan pemerintah dengan pengusaha, akan tetapi juga memberikan keuntungan di masa mendatang bagi kedua belah pihak, transfer teknologi, perbaikan kondisi ekonomi lingkungan sekitar investasi dan meningkatkan mutu SDM akibat adanya pengaruh usaha dari pihak investor.

---

<sup>47</sup> Andrew F. Cooper, Brian Hacking dan William Maley. 2008. *“Global Governance and Diplomacy Worlds Apart?”*. New York: Palgrave Macmillan. Hal. 41-42

Pola hubungan yang terjadi di Kabupaten Brebes tidak lain akibat pengaruh globalisasi yang melakukan pergeseran aktifitas dalam hubungan internasional. Agar dapat memetik keuntungan dari globalisasi, maka Pemerintah Kabupaten Brebes perlu melakukan lompatan kebijakan untuk mampu menangkap peluang dan mempromosikan peluang dan potensi yang dimiliki oleh daerah secara lebih atraktif, karena pada hakekatnya pertarungan dalam dunia ‘tanpa batas’ saat ini adalah kompetisi atau persaingan. Dikatakan persaingan karena setiap aktor internasional akan melakukan berbagai upaya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari kemudahan hubungan antar bangsa dan menghindari kerugian yang akan menimpanya. Pada kesempatan yang sama setiap aktor akan meningkatkan kerjasama dari berbagai aspek dan dimensi agar ia mampu melindungi kelemahan sembari memanfaatkan peluang yang tersedia di berbagai belahan bumi.

Pemerintah Kabupaten Brebes menunjukkan respon dukungan terhadap pemanfaatan peluang hubungan internasional dalam bidang ekonomi politik. Bahkan didukung dengan koordinasi yang saling menguatkan antar lembaga terkait, menjadi nilai lebih tersendiri bagi Kabupaten Brebes untuk dapat menarik minat investor asing menanamkan modalnya di wilayah ini. Akan tetapi, juga memerlukan persiapan yang optimal baik potensi yang akan dibawa ke pasar internasional dan persiapan aparatur pendukung, lembaga yang akan menjalankan dan sumber dana. Hal-hal tersebut perlu diantisipasi agar dapat meminimalisir ketidak efektifannya hubungan investasi ini.

Orientasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang “pro” kepada kehadiran investasi di kawasan industri dan lokasi-lokasi usaha tertentu kemudian ternyata membuahkan hasilnya. Tanpa diduga arus masuk modal asing, kredit investasi dan Foreign Direct Investment (FDI) ke wilayah-wilayah tersebut meningkat dengan tajamnya. Hiruk pikuk dan peningkatan pembangunan proyek-proyek investasi dalam segala jenis kegiatan dan besaran skala usaha mewarnai perekonomian nasional dan perekonomian lokal. Tingkat pengangguran dapat ditekan dan terjadilah lonjakan tajam dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pendapatan rumah tangga.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dan calon investor di negeri kita adalah bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat memberikan iklim yang kondusif untuk terselenggaranya investasi. Pada tingkatan pemerintah pusat, masalah yang dihadapi adalah masih belum terlihatnya yang jelas dalam strategi pengembangan industrialisasi. Strategi yang demikian sangat diperlukan sehingga birokrasi pada pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten, dapat menyatupadukan dan melakukan koordinasi atas rancangan-rancangan pengembangan investasinya di daerah untuk dapat mendukung tercapainya target-target dari strategi industrialisasi nasional tersebut.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat memelihara iklim usaha yang baik dan tidak memberatkan dunia usaha dan para calon investor di kawasannya masing-masing. Akhirnya bagi masyarakat, pada era demokratisasi saat ini yang sedang marak akhir-akhir ini dengan berbagai tuntutan-tuntutan yang berlebihan janganlah mengorbankan iklim usaha yang telah terbina. Pengusaha dan calon investor di manapun menuntut kenyamanan, keamanan dan kepastian berusaha dari proses penanaman modalnya di daerah. Kemajuan dan peningkatan volume produksi dari kegiatan-kegiatan investasi yang diunggulkan sudah pasti lambat laun akan memberikan efek pengganda pada perekonomian lokal dan pendapatan rumah tangga masyarakat disekitarnya.

Masih banyak lagi tantangan-tantangan lainnya untuk disebutkan satu persatu disini. Yang jelas baik kalangan pebisnis sendiri maupun para pelaku-pelaku ekonomi dan administrasi pemerintahan perlu melakukan perubahan-perubahan cara pandang, penerapan tata kelola perusahaan dan tata kelola administrasi pemerintahan yang saling mendukung demi terciptanya percepatan investasi di masing-masing daerah dan lokalitas.

Kondisi kehidupan perekonomian dan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera merupakan harapan yang banyak ditunggu oleh putra-putri Indonesia dalam menyongsong masa depannya. Harapan yang mereka sangat tunggu adalah kapankah lapangan kerja di sekitar mereka dapat tersedia dengan cukup dan memadai. Mereka telah melihat sendiri dan turut serta dalam menggulirkan berbagai reformasi, tentunya dengan harapan pada suatu saat akan dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Lapangan kerja yang memadai dan penerapan sistem balas jasa di perusahaan secara berkecukupan dapat terselenggara apabila proses investasi secara langsung dapat bergulir seperti sediakala. Bahkan untuk mengejar keterlambatan dalam memacu mesin perekonomian kita, ternyata masih diperlukan lagi lonjakan jumlah investasi yang besar dan dahsyat. Kondisi perekonomian di negara kita yang berangsur baik dalam beberapa tahun terakhir masih perlu didorong lebih lanjut dengan memacu kehadiran dan tambahan investasi yang berasal dari masyarakat, investasi PMDN maupun investasi PMA.

Orientasi pada pembangunan ekonomi nasional dan lokal perlu dibuat agar lebih mendekatkan pada kepentingan kehadiran calon-calon investor di berbagai pelosok tanah air. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang sudah ada harus dijaga eksistensinya, agar mereka tetap betah dan dapat menjalankan kegiatan usahanya di lokasi-lokasi tersebut.

Tekanan-tekanan yang menuntut keadilan dan perbaikan kesejahteraan karyawan perlu dilakukan dengan sopan, senantiasa mencari solusi-solusi kompromi demi kepentingan kelangsungan hidup usaha. Janganlah tujuan-tujuan politik dan kepentingan dari segelintir kelompok dicampur-adukkan dalam proses pemberian perijinan investasi dan usaha dengan memperpanjang jalur birokrasi.

Proses otonomi daerah pun perlu dilakukan dengan bijak tanpa membebani kepentingan dunia usaha secara berlebihan. Proses pencarian dan penetapan sumber-sumber keuangan pemerintahan daerah hendaknya dapat dilakukan dengan memperhatikan keberlangsungan dan eksistensi perusahaan-perusahaan yang telah bermukim lama di daerah. Budaya melayani kepentingan calon investor baru perlu ditanamkan diseluruh jajaran aparat birokrasi pemerintahan. Dalam hal ini perlu dimengerti bahwa wilayah atau kawasan tempat berusaha tidak lagi dapat ditawarkan dan dipromosikan dengan mudah.

Masih ada ratusan alternatif tempat usaha di berbagai lokalitas di penjuru dunia yang memiliki aksesibilitas ke pasar global. Tidak ada cara yang lebih baik apabila birokrat pemerintahan memberikan pelayanan yang terbaik, memangkas birokrasi, mengurangi beban-beban usaha yang berlebihan, menciptakan iklim investasi dan usaha serta mempersiapkan putra-putri di daerah untuk dapat berpartisipasi dalam proses kegiatan investasi. Dengan cara demikian maka kita telah memberikan

warisan terbaik baik putra-putri bangsa, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, lebih luas.

Dalam pengaturan dan kebijakan investasi terkait dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah, maka pemerintah daerah dan masyarakat di daerah haruslah yang menjadi prioritas dalam menikmati hasil investasi karena daerah yang menguasai faktor produksi. Penguasaan faktor produksi menyebabkan keputusan tentang apa yang ingin diproduksi berada di tangan siapa yang memiliki faktor produksi tersebut.<sup>48</sup> Pola kebijakan penanaman modal yang diterapkan di daerah untuk menarik investor sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah daerah harus terus mengkaji sektor-sektor investasi yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantages*) untuk dikembangkan.

Industrialisasi tidak hanya menaikkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, seperti penambahan penduduk akibat datangnya penduduk yang bekerja di pabrik, terjadi pola pergeseran ekonomi masyarakat, pergeseran dalam pola hidup serta masalah-masalah lain yang terjadi akibat perubahan-perubahan tersebut. Masalah yang seringkali terjadi adalah perubahan pekerjaan dari sebagian besar masyarakat (terutama yang tinggal di pedesaan), yang semula bekerja sebagai buruh tani menjadi buruh industri (pabrik).

Perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja cenderung memilih warga di sekitar pabrik untuk dipekerjakan. Hal ini terkait dengan keamanan pabrik serta sebagai konsekuensi alih fungsi lahan pertanian milik masyarakat. Pertumbuhan sektor industri di daerah tidak sejalan dengan perkembangan di bidang pertanian, bahkan seringkali pertanian dijadikan korban untuk menghidupkan industri. Sebagian besar lahan pertanian dialihfungsikan sebagai lahan industri yang membutuhkan biaya pembangunan besar. Lahan pertanian dibeli dengan harga dan tenaga kerja yang terserap industri lebih banyak wanita yang berupah murah sebagai bentuk konsekuensi dari biaya pembangunan dan produksi yang besar.

Istri atau wanita dan pemuda (anak) yang bekerja merupakan salah satu alternatif solusi bagi masyarakat miskin untuk bertahan hidup. Keluarga petani padi

---

<sup>48</sup> Gregory dan Stuart, *Comparative Economic System*, 4th Edition, Boston, Houghton Mifflin Company, 1993 yang dikutip oleh Adi Sulistiono dalam bukunya *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, 2009 Sidoarjo : diterbitkan oleh Masmedia Buana Pustaka. Hal. 34

atau bawang merah membutuhkan waktu antara 6 dan 3 bulan sampai panen dan dapat dijual. Kondisi yang demikian membuat istri merasa perlu membantu dengan bekerja. Begitu pula dengan anak, terutama anak tertua, apabila telah merasa cukup umur, dia akan bekerja untuk membantu menyekolahkan adik-adiknya. Kehadiran industri di lingkungan tempat tinggalnya, membuat sebagian besar wanita dan pemuda daerah agraris tertarik bekerja di pabrik. Gaji yang cukup (antara Rp. 1.500.000,00 – Rp. 2.500.000,00 per bulan), kualifikasi pendidikan yang memenuhi (sebagian besar warga Kabupaten Brebes hanya lulusan SMP dan SMA, serta kemudahan bekerja (jarak tempat kerja dengan rumah relatif dekat, jam kerja bisa disesuaikan dengan urusan keluarga) membuat banyak warga yang lebih memilih bekerja di pabrik. Laki-laki sebagian besar bekerja sebagai teknisi dan security, sedangkan wanita bekerja di bagian produksi karena lebih rapi dan teliti.

Kehadiran industri di tengah-tengah masyarakat yang sehari-hari hanya mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber mata pencahariannya tentu membawa dampak yang signifikan. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bagaimana industri mempengaruhi perubahan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Brebes. Perubahan mata pencaharian ini biasanya diiringi dengan perubahan sosial ekonomi pelakunya.

Perubahan dalam sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat industri di Kabupaten Brebes. Sistem kekeluargaan yang ada sedikit merenggang. Gotong-royong dan rasa tolong menolong dalam membantu warga sekarang dilakukan hanya pada komunitas tertentu saja, misalnya seseorang yang membutuhkan bantuan uang lebih memilih meminjam uang di bank daripada meminjam kepada tetangga. Hal ini antara lain terlihat dari alasan pemilik lahan pertanian yang masih menggarap sawahnya meskipun dia telah bekerja di pabrik. Mereka sudah menganggap para pekerja (buruh) tani sebagai keluarganya sendiri karena hampir setiap tahun para pekerja selalu bekerja di bawah pemilik sawah yang sama. Adanya sistem patron-klien antara pemilik sawah dengan pekerja menyebabkan saling ketergantungan antara keduanya. Misalnya ketika buruh tani membutuhkan uang, maka pemilik sawah akan memberikan pinjaman dan selanjutnya akan dipotong dari upah pekerja tanpa dikenakan bunga sama sekali.

Perubahan masyarakat yang lebih individualis dan konsumtif, serta mulai merenggangnya norma-norma agama dalam masyarakat akibat adanya industrialisasi. Perubahan secara ekonomi yang signifikan dan pengaruh dari metropolis membuat masyarakat cenderung lebih konsumtif. Hal demikian memang terjadi di masyarakat Kabupaten Brebes, di mana warga yang bekerja di pabrik dan memiliki sawah cenderung lebih mapan dari segi ekonomi dibandingkan dengan warga yang hanya bekerja di sawah ataupun di pabrik. Hal ini dapat dimaklumi karena warga yang memiliki dua matapecaharian bisa menyisihkan penghasilan dari sawah untuk menabung. Pekerjaan di bidang industri lebih diutamakan daripada sebagai pertanian karena hasil dari pabrik tetap setiap bulannya.